

## **Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles (Sebuah pengantar filsafat politik klasik)**

**Muhammad Fadil**

### **Abstract**

*It's rather difference than Plato's political idea, Aristotle expanded his political views into more scientific models. He elaborated the ideas of democracy, oligarchy, tyranny, and more which are becoming fundamental to basic knowledge of political studies. In spite of its classiness, Aristotle had put great contributions to basic political studies. All students studying politic need to see this philosophical aspect of politic and government.*

**Keywords: Government, Democracy, Oligarchy, Tyranny, Statesman**

---

### **A. Pendahuluan**

Sebagai murid Plato, Aristoteles menjadi seorang filosof yang tidak melanjutkan ide-ide gurunya dalam tema-tema tertentu dalam filsafat. Kecerdasannya pada persoalan-persoalan dasar filsafat membawa dirinya sebagai seorang filosof yang mampu memberikan ide-ide baru dalam persoalan filsafat. Pada gagasan Plato, di dalam karyanya *Republic*, negara digambarkan dalam bentuk personifikasi manusia.<sup>1</sup> Bentuk negara dan pemerintahan digambarkan dalam bentuk sifat manusia. Sifat tersebut menjadi gagasan Plato mengenai bentuk negara yang dibentuknya hingga etika politik yang ditimbulkannya. Bentuk negara-

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan saya sebelumnya tentang Plato. Lihat tulisan saya *Gagasan Dasar Mengenai Etika dan Negara Menurut Plato*. 2011.

negara yang ada menjadi konsekuensi tersendiri dari kepemimpinan yang dijelankannya.<sup>2</sup>

Ide Plato yang disampaikan lewat *Republic* menjadi teori awal mengenai negara ideal yang dalam filsafat politik. Melalui sosok guru yang dikaguminya, Socrates, ia mengemukakan argumen-argumen dalam sebuah dialog. Filsafat politik Plato memang tidak bisa dilepaskan dari ide-ide filosof sebelumnya terutama Socrates. Ia merupakan filosof yang sangat terkenal dengan usahanya mencari kebenaran yang pasti. Ide-idenya kaya akan filsafat moral yang membahas hakikat kebaikan manusia. Plato, walaupun telah mengembangkan konsep epistemologis yang lebih kaya dari Socrates, tetap tidak melepaskan filsafat moral dalam menjelaskan manusia dan politik.

Oleh Aristoteles, tradisi filsafat moral dan etika dalam pemikiran filsafat yang telah dilakukan oleh pendahulunya mulai bergeser. Ia mengembangkan konsep filsafat yang berbeda secara ontologis dan epistemologis. Pada pemikirannya konsep logika mulai diperkenalkan dengan dikaji secara sistematis. Persoalan-persoalan sains juga menjadi pembahasan tersendiri dalam karya-karya Aristotle dan pada dasarnya tidak lepas bagaimana manusia melihat permasalahannya.<sup>3</sup> Filosof klasik pada umumnya memberikan perhatian pada manusia pertama kali, seperti apa fungsi akal manusia terhadap kehidupannya, apa tujuan manusia, dan apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam hidupnya.<sup>4</sup> Aristoteles merupakan filosof mulai memberikan perhatian terhadap studi-studi yang berpondasi sains alam. Filsafat Aristoteles mulai menjangkau ke beberapa bidang seperti logika, studi kealaman, metafisika, politik dan etika.

## **B. Negara dan Warga Negara.**

Dibandingkan pendahulunya, Plato dan Socrates, Aristoteles semakin membagi tema-tema pembahasan bidang keilmuan. Plato yang menggunakan dokumentasi dialog Socrates menjadi awal dalam

---

<sup>2</sup> Bentuk negara demokratis atau tirani menggambarkan sifat-sifat masyarakat seperti menuntut persamaan dan kebebasan atau memanfaatkan kekuasaan berdasarkan kehendaknya.

<sup>3</sup> Edward Craig. *Philosophy: Very Short Introduction*. (New York: Oxford University Press), 2002.

<sup>4</sup> Kebanyakan filosof memang tidak hanya fokus dalam satu bidang semata, tetapi juga melingkupi beberapa bidang lain seperti metafisik dan sains.

pemilahan tema filsafat. Pembahasan kompleks tersebut telah menyentuh aspek-aspek tertentu seperti tentang manusia dan negara.<sup>5</sup> Pada zaman Aristoteles pemilahan tersebut semakin luas dan spesifik. Khusus untuk negara dan pemerintahan, Aristoteles menjelaskan beberapa bagian pembahasan dalam *Politic*.<sup>6</sup>

Dalam pemikiran filsafat Plato, ada garis yang menghubungkan persamaan di antara pemikiran mereka, yaitu bahwa sebuah negara tidak bisa dilepaskan dari individu yang mempunyai kualitas moral baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana perhatiannya terhadap keadilan, kebijaksanaan, dan nilai moral lainnya tidak bisa dilepaskan dalam pembahasan mereka mengenai kehidupan manusia dalam politik. Hal ini memang sebuah kontinuitas dari pemikiran filsafat Socrates yang penekanan filsafat moralnya sangat besar. Price menjelaskan “*Plato followed his teacher Socrates into ethics by way of a question that remained central in Greek thought*”.<sup>7</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Aristoteles.<sup>8</sup> Walaupun penjelasan mengenai negara dan moral Aristoteles sedikit berbeda dengan pendahulunya, permasalahan yang dijelaskannya memperlihatkan sebuah keterkaitan antara manusia dan etika dan bagaimana hubungan antara manusia dan moral hingga terbentuknya sebuah ‘negara’ merupakan sebuah bagian yang tersatukan.

Menurut Aristoteles negara adalah sebuah komunitas yang dibentuk untuk sebuah kebaikan. Sistem keilmuan politik (*political science*) mulai terbentuk dalam kajian Aristoteles seperti ketika Aristoteles membedakan model komunitas (*negara*).<sup>9</sup>

Tidak berbeda dengan Plato, Aristoteles mulai berangkat dari model *rumah tangga*. Model *rumah tangga* dibangun dari bentuk hubungan antara pria-wanita, tuan-budak, dan orang tua-anak. Model hubungan

---

<sup>5</sup> Pembahasan mengenai negara secara jelas diuraikan oleh Plato dalam karyanya *Republik*, sedangkan dalam karya Aristoteles diuraikan dalam karyanya *Politik*.

<sup>6</sup> *Politic* karya Aristoteles yang penulis gunakan ialah terjemahan Benjamin Jowett.. Rujukan *Politic* dapat dilihat pada <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html>

<sup>7</sup> A.W Price. “Plato: Ethics and Politics”. C.C. W. Taylor (Ed). *Routledge History of Philosophy: From the Beginning to Plato*. (London: Routledge, 1997), 366.

<sup>8</sup> *Ibid*. Dalam karyanya *Nichomacean Ethics* dan *Politic*, Aristoteles mempunyai formulasi yang berbeda mengenai ide-ide moral dari pendahulunya, Plato. Namun, perhatiannya terhadap moral tetap menjadi karakteristik pemikiran filsafat yang bersambung dari para pendahulunya.

<sup>9</sup> Penyebutan untuk pemimpin negara saling bergantian satu sama lain, seperti raja atau pemimpin negara, hal ini dapat dilihat dalam *Republik*. Plato lebih menggunakan istilah *king-philosopher* untuk menyebut pemimpin Negara (lihat tulisan saya tentang Plato).

tuan dan budak sepertinya menjadi contoh baik yang digunakan dalam menggambarkan masyarakat politik yang terus digunakan hingga generasi modern.<sup>10</sup> Penggambaran model 'perbudakan' ialah bahwa manusia pada hakikatnya dapat menjadi budak atau manusia bebas, baik dari alam maupun dari hukum. Hal ini tidak dapat dielakkan ketika dalam sebuah komunitas 'pemanfaatan' sumber alam menjadi bagian dari proses bernegara.

Berbeda dengan sistem politik modern ketika faktor pemilikan modal, kekuasaan, atau suara rakyat menjadi analisa umum, pada zaman Aristoteles faktor lain seperti 'keluhuran ilmu' cukup lazim dalam pembahasan filsafat politik klasik, tetapi itu tidak menjadi konsep utama Aristoteles. Pengelolaan modal alam yang harus dinikmati oleh setiap orang harus ada yang mengatur. Pengumpulan kekayaan tersebut, menurut Aristoteles, dikelola oleh tuan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam *rumah tangga* ketika ekonomi *rumah tangga* perlu dikelola dengan baik. Kebutuhan dasar tersebut merupakan urusan masyarakat agar tujuan masyarakat dan bernegara dapat dicapai, yaitu kebaikan dan keadilan.

Kewarganegaraan menurut Aristoteles pun dikaji apakah warga negara terjadi secara alami atau memang ada kesepakatan awal yang dibuat. Aristoteles memberikan sebuah contoh bagaimana perubahan terjadi pada warga Athena. Ketika kekuasaan tirani berhasil ditumbangkan, penguasa baru menjamin kewarganegaraan bagi sejumlah orang asing dan para budak yang terdapat di dalamnya. Namun, hal tersebut lebih disebabkan karena ketidakadilan atau keadilan dari penguasa. Dari adanya kesatuan manusia (*human being*) ini terciptalah sebuah kota atau negara. Negara tak lain terbentuk sebagai sebuah komposisi antara rakyat dan pengaturnya.<sup>11</sup>

#### *Konstitusi Negara*

Dalam sebuah komunitas yang lebih besar, ketika pengelolaan kekayaan menjadi kebutuhan, kebutuhan kekuatan militer untuk melindungi diri dari serangan, dan mewujudkan rasa keadilan pada seluruh negara, maka perlu ada sebuah aturan dalam pengelolaannya. Penekanan hukum menjadi penting, menurut Aristoteles, dalam sebuah

---

<sup>10</sup> Misalnya Karl Marx yang mengkaji persoalan kelas; *borjuis* dan *proletar*.

<sup>11</sup> Aristotle. *Politic (Book III)*. p.v

pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan konstitusi. Beberapa penerapan konstitusi tidak lepas dari model pemerintahan yang diberlakukan.

Beberapa model telah dikenal seperti demokrasi, aristokrasi, dan oligarki yang ilustrasi pelaksanaannya dapat dilihat di Athena atau Lacedaemonian. Permasalahan-permasalahan konstitusi dalam mengarahkan masyarakat tidak selalu berjalan sesuai. Aristoteles menggunakan contoh Lacedaemonian, Cretan, Chartaginian, dan Sparta dalam menjelaskan bentuk konstitusi apa yang baik. Sistem yang memberikan peluang bagi 'kelas' bawah dan miskin untuk terlibat dalam pemerintahan akan memberikan peluang terciptanya korupsi dan penyuapan.

### **C. Bentuk Pemerintahan 'Baik'**

#### *Kepemimpinan dan Jenis Pemerintahan*

Perbandingan-perbandingan yang dibuat oleh Aristoteles tentang siapa yang paling berpengaruh dan siapa yang harus memimpin di evaluasi cukup panjang. Siapakah yang bisa disebut paling berkuasa terutama dalam kondisi ideal? Aristoteles tidak memberikan jawaban langsung. Uraian demi uraian dijelaskan. Seperti persoalan ketika kekuasaan tertinggi negara yang ideal itu dipegang oleh satu orang (raja) yang berkuasa penuh atau dipimpin oleh raja tetapi konstitusi juga melibatkan dewan yang diisi oleh orang-orang tertentu. Ia mengatakan

*...supposing the principle to be maintained that kingly power is the best thing for states, how about the family of the king? Are his children to succeed him?"<sup>12</sup>*

Walaupun pemerintahan dipimpin oleh raja, menurut Aristoteles, setidaknya pemerintahan dalam hal wewenang tertinggi ada tiga bentuk: oleh satu orang, oleh sekumpulan kerabat, atau oleh beberapa orang.

Aristoteles memulai dengan beberapa penjelasan mengenai jenis pemerintahan monarki (bukan dalam arti umum yang selalu berhubungan dengan kerajaan):<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* p.xvi

<sup>13</sup> Aristotle. *Politic (Book IV)*.

1. Monarki tidak absolut. Aristoteles memberikan contoh pada Lacedaemonian ketika kekuasaan raja tidak absolut, kecuali dalam kondisi tertentu.
2. Monarki absolut. Jenis pemerintahan seperti ini tak ubahnya seperti pemerintahan Tirani, tetapi yang membedakannya bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh raja dijalankan sesuai dengan hukum dan diwariskan dibandingkan oleh seorang tiran.
3. Tirani absolut. Model kekuasaan yang diktatorian.
4. Monarki yang terkontrol. Jenis kepemimpinan raja seperti ini diterima sekaligus diawasi oleh masyarakat yang dibentuknya. Loyalitas terbentuk diantara mereka.
5. Monarki terpisah. Bentuk seperti ini merupakan pemisahan dari beberapa monarki yang rajanya hanya mengelola wilayahnya masing-masing. Dalam kondisi tersebut, sehingga ada pengatur yang mengelola kerajaan-kerajaan kecil tersebut sebagai pemerintah.

Dari beberapa bentuk monarki di atas, Aristoteles kemudian menjelaskan bentuk seperti apakah yang paling umum dalam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut kemudian memang lazim digunakan hingga studi politik modern, seperti monarki, oligarki, demokrasi, dan semacam aristokrasi.<sup>14</sup> Terdapat pula jenis lain yang menurutnya kurang umum, yaitu pemerintahan yang berdasarkan konstitusi (*polity*). Model terakhir tersebut ditekankan oleh Aristoteles untuk membentuk pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Seperti apakah pemerintahan yang baik, secara bentuk maupun konstitusi? Istilah aristokrasi, oligarki, monarki, tirani, dan demokrasi digunakan berulang kali oleh para filosof klasik sebelum Aristoteles dan terus menjadi istilah yang terus digunakan hingga saat ini. Dari beberapa bentuk pemerintahan, Aristoteles menganalisa kualitas bentuk pemerintahan yang dibahas oleh filosof-filosof sebelumnya. Para filosof tersebut tidak selalu sejalan mengenai mana yang terbaik.<sup>15</sup> Aristoteles

---

<sup>14</sup> *Ibid.* p. vii.

<sup>15</sup> Pada konteks sekarang, istilah demokrasi merupakan istilah dalam menggambarkan system politik dan pemerintahan yang ideal. Demokratisasi telah menjadi tujuan besar dalam membentuk masyarakat dan pemerintahan yang 'terbaik'. Walaupun bisa dikatakan ideal, proses demokratisasi juga menjadi bentuk propaganda negara-negara Amerika Serikat dan Eropa untuk menekan yang dianggap kurang demokratis.

memberikan analisa mengenai bentuk pemerintahan yang ada, yaitu dengan memperhatikan hal-hal seperti:

- a. Variasi bentuk dari konstitusi yang dijalankan.
- b. Model konstitusi apa yang paling dapat diterima secara umum.
- c. Dari apa yang paling sesuai deri bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, karena masing-masing memiliki konstitusi yang lebih baik atau sebaliknya.
- d. Bagaimana seseorang akan menjalankannya.
- e. Memilah dari pelaksanaan konstitusi secara umum dan khusus.<sup>16</sup>

Baik demokrasi maupun oligarki masing-masing mempunyai ragam dalam bentuknya. Perhatiannya ialah siapa yang paling berwenang di dalam bentuk yang ada. Pada bentuk demokrasi suara mayoritas menentukan, tetapi ada beberapa perhatian seperti apakah mayoritas yang berkuasa. Kekuasaan dapat diperoleh oleh mereka yang miskin atau yang kaya, dan apakah demokrasi yang diterapkan dapat menjamin persamaan hak (*equality*). Pada bentuk oligarki, suara mayoritas tidak akan menjadi faktor kekuasaan. Pola-pola tertentu menjadi penentu kekuasaan, seperti orang-orang kaya atau kelompok-kelompok tertentu yang berperan.

Baik oligarki maupun demokrasi tidak berarti menjadi entitas yang terpisah, tetapi juga bisa saling mencerminkan. Menurut Aristoteles:

*These are the different sorts of oligarchies and democracies. It should, however, be remembered that in many states the constitution which is established by law, although not democratic, owing to the education and habits of the people may be administered democratically, and conversely in other states the established constitution may incline to democracy, but may be administered in an oligarchical spirit.*<sup>17</sup>

Demokrasi mempunyai variasi di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lepas dari jumlah populasi warga, jenis penghidupan mereka, dan derajat kehidupan yang dimiliki oleh mereka. Kritik Aristoteles terhadap demokrasi tidak berbeda dengan Plato. Para filosof tersebut mengatakan bahwa demokrasi akan gagal ketika kebebasan dan persamaan tidak berjalan baik. Kondisi yang mengarah kepada tirani

---

<sup>16</sup> Aristotle. *Politic. (Book IV)*.

<sup>17</sup> *Ibid.* p. v

akan mungkin terjadi. Untuk menghindari kondisi buruk tersebut, aturan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum, untuk menghindari dari aturan yang berdasarkan rezim semata. Hal tersebut dilakukan dengan cara membentuk pemerintahan yang konstitusional.

Pemerintahan yang baik menurut Aristoteles dapat dilihat pada, yaitu kepatuhan warga terhadap hukum dan baiknya hukum yang mereka patuhi. Di sisi lain warga juga dapat mematuhi hukum yang tidak baik.<sup>18</sup> Dalam iklim demokrasi dan oligarki, kondisi paling ideal bagi warga ialah ketika komunitas lebih banyak yang berada di kelas menengah (*middle-class*), bukan diisi paling banyak oleh warga kaya atau warga miskin. Konsitusi dari hasil legislatif inilah yang baik bagi masyarakat. Aristoteles memberikan contoh Charondas yang kekuasaannya banyak dipegang oleh legislator.<sup>19</sup> Bukan demokrasi, oligarki, atau aristokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan terbaik dalam kajian Aristoteles karena wilayah yang subur menjadi faktor untuk membangun sistem pemerintahan yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan wilayah.<sup>20</sup>

Pemerataan yang terpusat pada banyaknya jumlah kelas menengah akan memberikan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi yang baik. Oleh karena itu, Aristoteles meluaskan pemahaman demokrasi tidak sebatas pada seberapa banyak jumlah orang yang menguasai kekuasaan, tetapi lebih kepada kualitas-kualitas pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* p. viii

<sup>19</sup> *Ibid.* p. xi.

<sup>20</sup> Trevor J. Saunders. "The Politics (Aristotle: Ethic and Politics)". David Furley. *Routledge History of Philosophy Volume II: From Aristotle to Augustine*. (London: Routledge, 1999). 134.



### Daftar Pustaka

- Aristotle. (1981). *Politic (Book I-IV)* (Trans, Benjamin Jowett).  
<http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html>
- Craig, Edward. (2002). *Philosophy: Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Price, A.W. (1997). "Plato: Ethics and Politics". C.C. W. Taylor (Ed). *Routledge History of Philosophy (Vol I): From the Beginning to Plato*. London: Routledge.
- Trevor J. Saunders.(1999). "The Politics (Aristotle: Ethic and Politics)". David Furley. *Routledge History of Philosophy (Vol I)I: From Aristotle to Augustine*. London: Routledge.